

ALDIS

Indonesian Legal Documentation Information System



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

@2020



INTEGRASI JDIHN



**Standar Pengelolaan
Dokumen & Informasi
Hukum**



Pendahuluan

E-Reporting



ILDIS



JDIHN



MATERI

PENATAAN REGULASI SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS PEMERINTAH

REFORMASI HUKUM JILID II

Home / News / Nasional

Ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II

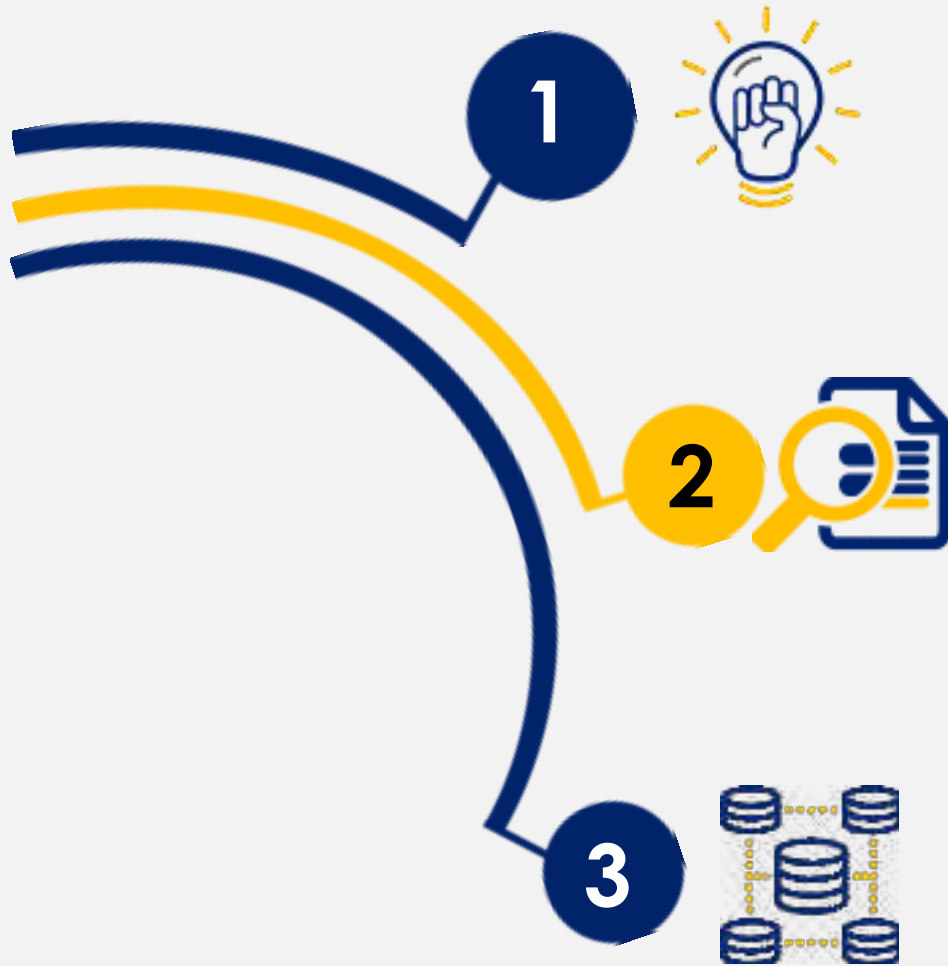
FABIAN JANUARIUS KUWADO



- 1. Penataan Regulasi**
- 2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil**
- 3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)**



Agenda Penataan **Regulasi**



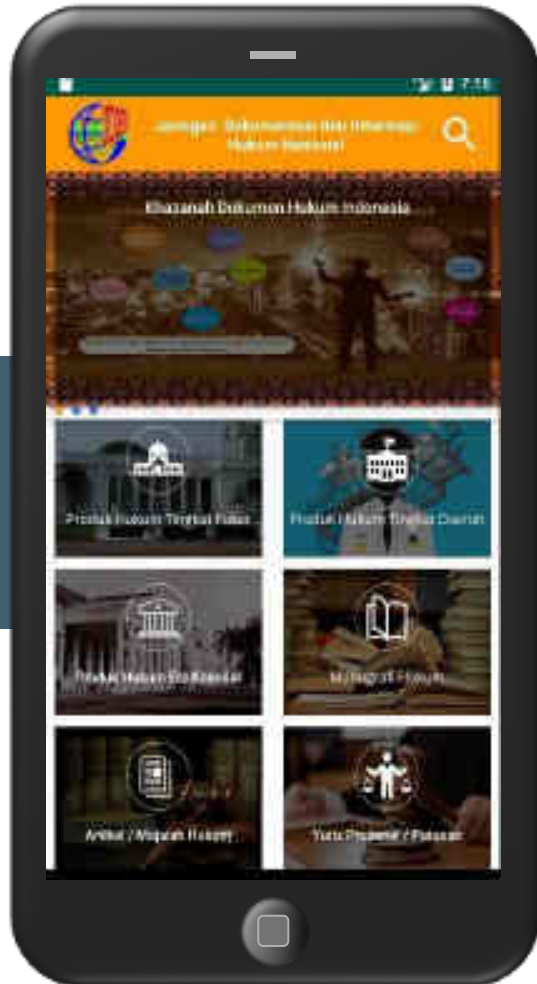
Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi Seluruh Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan yang Terintegrasi



JDIHN



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

yang selanjutnya disebut **JDIHN** adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;



Dokumen Hukum

produk hukum yang berupa **peraturan perundang-undangan** atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada **putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan**;



Dasar Hukum

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (20 Maret 2012)



Organisasi JDIHN



PUSAT JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan HAM



Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian, Lembaga, LPNK, LNS, Pemprov, PemKab/Kota, Setwan Prov/Kab/Kota



Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta



Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri

Anggota JDIHN



Organisasi JDIHN



Pimpinan Instansi (**Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota**) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya



Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negara bertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya



Pemerintah Provinsi bertindak sebagai **Pusat JDIH** di wilayahnya



Organisasi JDIHN

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan



Anggota JDIHN



Tugas Anggota JDIHN

Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya

Fungsi Anggota JDIHN

1)

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya

2)

Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN

3)

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya

4)

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya

5)

Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

6)

Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN



Perpres Nomor 33 Tahun 2012

Bab III

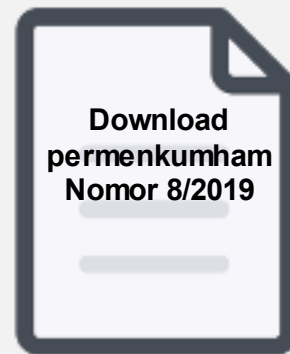
Tugas Dan Fungsi Pusat Dan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Pasal 10 Ayat 2 Huruf B

Pembangunan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Website Pusat JDIHN



“Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum”



Standar Pembuatan Abstrak Per-UU



Standar Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum



Standar Laporan Evaluasi JDIHN



Instrumen untuk menciptakan **Keseragaman** Pengelolaan Bahan Dokumentasi, mempercepat **Penemuan Kembali** Bahan Dokumentasi, dan meningkatkan Pelayanan dan **Akses Publik** terhadap Informasi Hukum.



Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan

1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan, sumber, dan judul
2. Dasar Pertimbangan (meringkas dasar menimbang dan atau penjelasan umum peraturan)
3. Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, dengan cara penulisan : singkatan jenis, nomor dan tahun peraturan)
4. Materi Pokok (meringkas isi yang terkandung dalam batang tubuh)
5. Catatan (tanggal berlaku, peraturan terkait, peraturan yang dicabut/diubah)

PERMENDAGRI NO.84, BN 2014/NO.1837, 13 HLM.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 19 PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan PERMENDAGRI tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2010; PERPRES No.88 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengorganisasian yang mana Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ditingkat Kecamatan dilimpahkan kepada Camat. Perekrutan Anggota Satlinmas oleh Kepala Desa/Lurah secara sukarela dan terbuka, yang masa kerjanya sampai 00 tahun atau sampai diberhentikan. Tugas, hak, kewajiban dan pemberdayaan Satlinmas. Menteri melakukan pembinaan umum, Gubernur, Bupati/Walikota pembinaan teknis operasional. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota selanjutnya dilaporkan ke Gubernur kemudian ke Menteri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014

- Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Permen ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ini

- Lamp. : 1 hlm.



Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum



Standar Website JDIH



Standar Metadata



Integrasi JDIHN



Standar Website JDIH

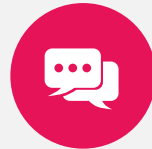
Nama Domain

[https://jdih.\(instansi\).go.id](https://jdih.(instansi).go.id)
<https://jdih.lkpp.go.id>



Logo Pusat JDIHN

Memuat Logo Pusat JDIHN di pojok kiri atas layar



Daftar Link

Menampilkan daftar link website anggota di bawah instansinya



Kontak kami

Alamat dan kontak person pengelola JDIHN



Struktur Organisasi

Struktur Organisasi JDIH Instansi



Konten

Konten/isi dalam aplikasi JDIH harus berisi Dokumen Hukum



Search engine

Terdapat penelusuran/ *search engine*



Indeks Kepuasan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi JDIHN



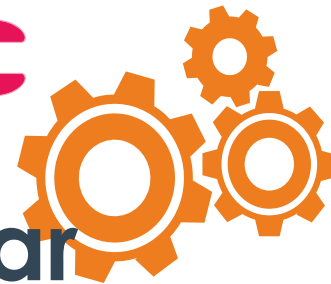
ILDIS



Indonesian Legal Documentation Information System



Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum



ILDIS

Indonesian Legal Documentation Information System

ILDIS merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen hukum sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

Tujuan: memfasilitasi anggota JDIHN dalam pengolahan dokumen hukum dalam website JDIHN anggota

Dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
2018 – ILDIS ver. 1
2019 – ILDIS ver. 2



ILDIS v 1.0 vs ILDIS v 2.0

Aplikasi

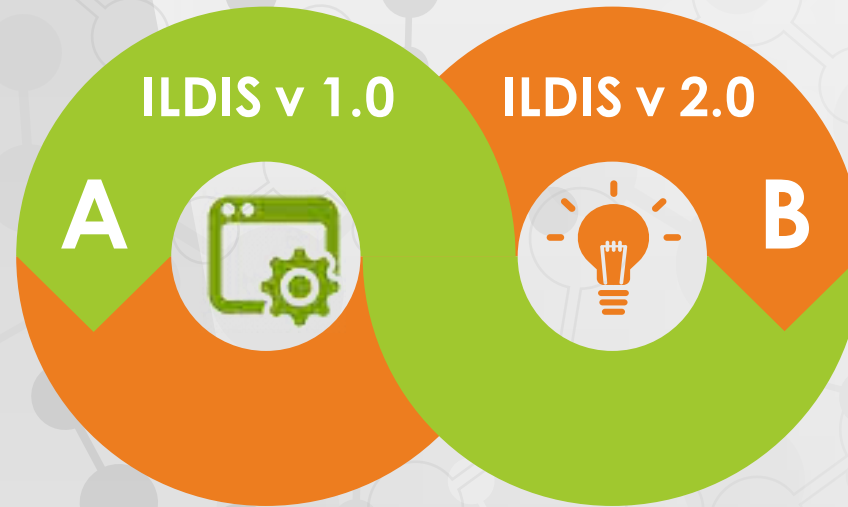
Aplikasi website (*front-end*) dan aplikasi pengolahan dokumen Hukum ada pada 2 aplikasi berbeda.

Metadata

Metadata sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

Versi PHP

Versi php 5.6



Aplikasi

Aplikasi website (*front-end*) dan aplikasi pengolahan dokumen Hukum sudah dalam satu aplikasi.

Metadata

Metadata sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 + metadata tambahan.

Versi PHP

Versi php 7.2

[DOWNLOAD CARA PERMOHONAN APLIKASI ILDIS](#)



ILDIS



Indonesian Legal Documentation Information System

4 Tipe Pengolahan Dokumen Hukum



Peraturan
Perundang-undangan



Monografi
Hukum



Artikel/
Majalah Hukum



Putusan/
Yurisprudensi



Metadata Peraturan Perundang-undangan

Tersedia 8 Tab yang harus dilengkapi

1. Data Utama (jenis peraturan, singkatan jenis, judul, nomor, tahun, bidang hukum, tempat penetapan, tgl penetapan, tgl pengundangan, sumber, pemrakarsa, penandatanganan, urusan pemerintahan, bahasa)
2. T.E.U Badan
3. Subjek
4. Lampiran
5. Peraturan Terkait
6. Dokumen Terkait
7. Hasil Uji Materi
8. Status

The screenshot shows the 'Form Peraturan Perundang-Undangan' in the ILLDIS system. At the top, there are navigation tabs: 'Data Utama', 'T.E.U Badan', 'Subjek', 'Lampiran', 'Peraturan Terkait', 'Dokumen Terkait', and 'Hasil Uji Materi'. Below these is a 'Status' section. The main form area is titled 'Form Peraturan Perundang-Undangan' and contains the following fields:

- Tipe Pengolahan Dokumen:** A dropdown menu with the selected option '1 - PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN'.
- Jenis Peraturan:** A dropdown menu with the selected option '--Silahkan Pilih--'.
- Singkatan Jenis Peraturan:** A text input field.
- Judul:** A text input field.
- Nomor Peraturan:** A text input field.
- Tahun:** A text input field.
- Bidang Hukum:** A dropdown menu with the selected option '--Silahkan Pilih--'.
- Tempat Penetapan:** A dropdown menu with the selected option 'Cari...'. Below it is a 'Provinsi' dropdown menu with the selected option '--Pilih Provinsi--'.
- Tanggal Pengundangan:** A date selection field.
- Tanggal Penetapan:** A date selection field.
- Pemrakarsa:** A text input field.
- Sumber:** A text input field.
- Bahasa:** A dropdown menu with the selected option '--Silahkan Pilih--'.
- Penandatanganan:** A text input field.
- Urusan Pemerintahan:** A dropdown menu with the selected option '--Silahkan Pilih--'.
- Drononikan Ke Beranda:** A dropdown menu with the selected option '--Silahkan Pilih--'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Dish' and 'Selanjutnya'.

[DOWNLOAD TUTORIAL CARA MENGINPUT PERATURAN DI ILLDIS](#)



Jenis Dokumen
**PERATURAN DAERAH
PROVINSI**

Status
BERLAKU

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Tempat Penetapan: DENPASAR
 Tanggal Penetapan: 26 MEI 2019
 Tanggal Pengundangan: 26 MEI 2019
 Sumber: LD BALI 2019 (4) : 33 HLM, TLD BALI 2019 (4) : 16 HLM.
 Urusan Pemerintah: BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Bidang Hukum: HUKUM ADAT
 Bahasa: INDONESIA
 Pemusnahan: PROVINSI BALI

- Lampiran: 2019pd0051004.pdf
- Keterangan Status:
- Mencabut PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN
 - Mencabut PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN

Jumlah Pengunjung: 5
 Jumlah Unduh: 0

Perundang-undangan: WAYAN KOSTER

Peraturan Terkait: Melaksanakan UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN

Dokumen Terkait: MENAGIH JANJI DESA ADAT

Hasil Uji MK: DATA TIDAK TERSEDIA

T.E.U Badan:

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
BALI	BADAN ORGANISASI	PENGARANG UTAMA

Sutgek: Kata Kunci: DESA ADAT

Judul ditulis lengkap!!!

Hasil Inputan

- Jenis status:
- Mencabut
 - Dicabut
 - Mengubah
 - Diubah

Metadata Monografi Hukum

Tersedia 4 Tab yang harus dilengkapi

1. Data Utama (jenis monografi, judul, tahun terbit, edisi, tempat terbit, penerbit, deskripsi fisik, ISBN, bahasa, eksemplar, catatan, gambar sampul)
2. T.E.U Badan
3. Subjek
4. Lampiran

*khusus buku hukum, lampiran tidak diupload (terkait dengan hak cipta)

The screenshot shows the 'Metadata Monografi' form in the ILDIS system. It is divided into four main sections, each with a tab at the bottom: 'Data Utama', 'Penerbit', 'T.E.U Badan', and 'Subjek'. The 'Data Utama' section includes fields for 'Judul', 'Tahun Terbit', 'Edisi', 'Tempat Terbit', 'Penerbit', 'Deskripsi Fisik', 'ISBN', 'Bahasa', 'Eksemplar', and 'Catatan'. The 'Penerbit' section has a 'Nama Penerbit' field and a 'Tambah Penerbit' button. The 'T.E.U Badan' section includes 'Mendapat Sanggung Jawab', 'ID ISBN', 'Info Detail Spesifik', and 'Modul / Layanan'. The 'Subjek' section includes 'Kategori Subjek' and 'Detail Subjek'. A 'Tambah Gambar' section is also visible, with a 'Choose File' button and a 'GAMBAR' label. The form has a 'Simpan' button at the bottom left and a 'Tambah Lampiran' button at the bottom right.

This screenshot shows the 'Tambah Lampiran' (Add Attachment) section of the ILDIS form. It features a 'Tambah Lampiran' button at the top. Below it, there are several rows of input fields for adding attachments, including fields for 'Judul', 'Tahun Terbit', 'Edisi', 'Tempat Terbit', 'Penerbit', 'Deskripsi Fisik', 'ISBN', 'Bahasa', 'Eksemplar', and 'Catatan'. Each row has a 'Tambah Lampiran' button next to it. The form is partially obscured by the orange background of the slide.

[DOWNLOAD TUTORIAL CARA MENGINPUT MONOGRAFI DI ILDIS](#)





Search

Jenis Dokumen
BUKU HUKUM

Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan

Lampiran

Jumlah Pengarang

0

Jumlah Unduh

0



Nomor Panggil
343.23 ARI M

Tempat Terbit
JAKARTA

Tahun Terbit
2008

ISBN
978-979-3975-83-7

Terdapat

Nama Pengarang

GREGE DARDA NAWATI

Tipe Pengarang

NAMA GRANG

Jenis Pengarang

PENYERANG TAYANGAN

Penerbit
KENCANA

Deskripsi Fisik
X, 203FILM ; 27CM

Database
INDONESIA

Subjek

Kata Kunci

HUKUM PIDANA-PENEGAKAN-PENANGGULANGAN

Data Eksemplar

Nomor Eksemplar

00019710

00019720

00019730

Status Eksemplar

Tersedia

Tersedia

Di Pinjam

Hasil Inputan

Metadata Artikel/Majalah Hukum

Tersedia 4 Tab yang harus
dिलengkapi

1. Data Utama (Jenis artikel, bidang hukum, judul, tahun, bahasa, sumber, kala terbit, judul seri)
2. T.E.U Badan
3. Subjek
4. Lampiran

The screenshot shows a web interface for entering metadata for a legal article. At the top, there are four tabs: 'Data Utama', 'T.E.U Pengarang', 'Subjek', and 'Lampiran'. The 'Data Utama' tab is active. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Tipe Pengolahan Dokumen' with the selected option '3 - ARTIKEL/MAJALAH HUKUM'. The main form area is titled 'Artikel Hukum' and contains several input fields:

- Jenis Bentuk Peraturan:** A dropdown menu with the option '-- Silahkan Pilih --'.
- Bidang Hukum:** A dropdown menu with the option '-- Silahkan Pilih --'.
- Judul:** A text input field.
- Tahun:** A text input field.
- Bahasa:** A dropdown menu with the option '-- Silahkan Pilih --'.
- Sumber:** A text input field.
- Promosikan ke Beranda:** A dropdown menu with the option '-- Silahkan Pilih --'.
- Kala Terbit:** A dropdown menu with the option '-- Silahkan Pilih --'.
- Judul Seri:** A text input field.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Draft' and 'Selanjutnya'.





Search...

Jenis Dokumen
KLIPING MAJALAH KORAN

Menanti Pengawas Terorisme

Lampiran

[RP-19-03-2019.pdf](#)

Jumlah Pengunjung

7

Jumlah Unduh

0

Tahun Penerbit

2019

Sumber

REPUBLIKA, 19-03-2019; VI/1

Bahasa

INDONESIA

Bidang Hukum

HUKUM PIDANA

T.E.U Badan

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
DJAMIL, M NASIR	NAMA ORANG	PENGARANG UTAMA

Subjek

Kata Kunci

PENCULIKAN-TERRORIS

Hasil Inputan

Metadata Putusan

Tersedia 5 Tab yang harus dilengkapi

1. Data Utama (Jenis putusan, singkatan jenis, pokok perkara, nomor putusan, tingkat proses, tingkat penetapan, tanggal dibacakan, bahasa, sumber, tahun, lembaga peradilan, pemohon/penggugat, termohon/tergugat, jenis perkara, klasifikasi, sub klasifikasi, amar/status, catatan amar, berkekuatan hukum tetap)
2. T.E.U Badan
3. Subjek
4. Lampiran
5. Putusan Terkait

The screenshot shows a web-based form for entering case metadata. At the top, there are five tabs: 'Data Utama', 'T.E.U Badan', 'Subjek', 'Dokumen Pokok', and 'Putusan Terkait'. The 'Putusan' tab is currently selected and highlighted in dark grey. Below the tabs, the form is organized into two columns of input fields. The left column includes: 'Jenis Putusan' (dropdown menu), 'Singkatan Jenis Putusan' (text input), 'Pokok Perkara' (text input), 'Tingkat Proses' (dropdown menu), 'Tanggal Dibacakan' (text input), 'Bahasa' (text input), 'Lembaga Peradilan' (text input), 'Pemohon / Penggugat' (text input), 'Termohon / Tergugat' (text input), 'Klasifikasi' (dropdown menu), 'Amar / Status' (text input), 'Berkekuatan Hukum Tetap' (text input), and 'Catatan Amar' (text input). The right column includes: 'Singkatan Jenis Putusan' (text input), 'Nomor Putusan' (text input), 'Tanggal Penetapan' (dropdown menu), 'Bahasa' (dropdown menu), 'Tahun' (text input), 'Pemohon / Penggugat' (text input), 'Jenis Perkara' (text input), 'Sub Klasifikasi' (text input), 'Catatan Amar' (text input), and 'Berkekuatan Hukum Tetap' (dropdown menu). At the bottom right, there are two buttons: 'Draft' and 'Selanjutnya'.





Cari

Jenis Dokumen: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Status:
BERLAKU

Lampiran

[138/PUU-XII/2014.pdf](#)

Jumlah Pengunduhan

4

Jumlah Unduh

0

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tempat Pengadilan

JAKARTA

Sumber

MAHKAMAH KONSTITUSI

Badang Hukum Jenis Perkara

-

Tanggal Diusulkan

07 SEPTEMBER 2015

Pengusul/Pemohon

AAN ENO WISARTO, HERMAN SURYOKUMORO, HARU PERMADI

Estimasi

INDONESIA

Amar Putusan

MENOLAK

Lokasi

JAKARTA

Terdaftar/Terpublikasi

-

Putusan Terkait

Status Putusan	Kasus	Badang	Pertama
DATA TIDAK TERSEDIA			

TELU Dider

Nama Pengusung	Tipe Pengusung	Jenis Pengusung
INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI	BADAN ORGANISASI	PENGARANG UTAMA

Subjek

Kata Kunci
PENOLJIAN UU BPJS

Hasil Inputan

Integrasi JDIHN

mengintegrasikan seluruh produk hukum yang ada pada database/server di masing-masing anggota jaringan, sehingga semua produk hukum yang diinput oleh anggota jaringan dapat diakses melalui satu sumber/mesin pencarian (search engine).

API akan melakukan pengambilan data berdasarkan log aktifitas database anggota, dari server anggota ke server JDIHN.



API akan bekerja apabila ada aktifitas (create, update, delete).



Application programming interface

Pelaporan Pengelolaan JDIH Secara Online

<http://e-report.jdihn.go.id>



Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

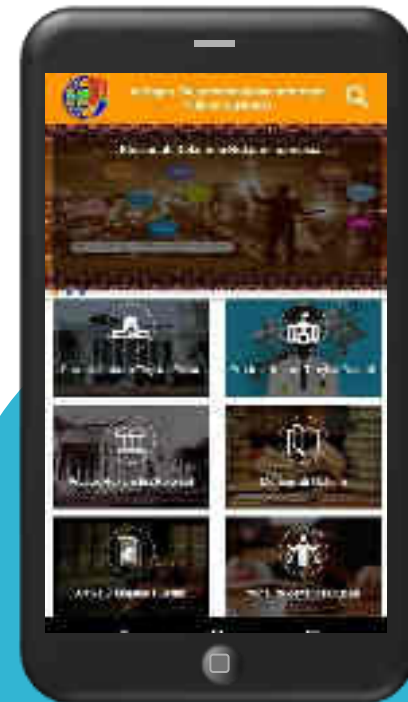
Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting

Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember

Aplikasi Android JDIHN



Download di
Playstore
atau googleplay
dengan nama
JDIHN



Terima Kasih



Indonesian Legal Documentation Information System

ILDIS

 jdihn.go.id

 jdihn@bphn.go.id

 [jdihnindonesia](https://www.linkedin.com/company/jdihnindonesia)

 [jdihnindonesia](https://twitter.com/jdihnindonesia)

 [jdihnasional](https://www.facebook.com/jdihnasional)